



Dampak Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis Terhadap Ekonomi Mikro di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus UMKM Jajanan Sekolah di Kabupaten Pringsewu)

Ade Maulidya¹⁾, Yulianto²⁾, Yori Tirta Kusuma³⁾

Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia¹⁾

Universitas Lampung, Lampung, Indonesia²⁾

Sekretariat Daerah Pesawaran, Pesawaran, Indonesia³⁾

ade.maulidya@fisip.unsri.ac.id¹⁾

Yulianto@fisip.unila.ac.id²⁾

yoriacer@gmail.com³⁾

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi siswa, namun implementasinya berpotensi menimbulkan dampak turunan terhadap ekonomi mikro, khususnya UMKM jajanan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi kebijakan MBG ekonomi mikro di lingkungan sekolah di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), UMKM jajanan sekolah berada dalam kondisi relatif stabil secara operasional dan menjadi sumber pendapatan penting bagi pelaku usaha. Perbedaan jenjang pendidikan memengaruhi jenis produk, daya beli siswa, dan besaran pendapatan, namun secara umum seluruh UMKM sangat bergantung pada pola konsumsi siswa. Setelah implementasi MBG, UMKM yang menjual produk konsumsi primer mengalami kontraksi pendapatan yang lebih signifikan akibat substitusi kebijakan, sedangkan UMKM dengan produk non-primer mengalami penurunan yang relatif lebih moderat. Hal ini menegaskan bahwa implementasi MBG membawa konsekuensi ekonomi mikro nyata bagi UMKM jajanan sekolah dan menekankan perlunya desain kebijakan yang integratif agar keberlanjutan usaha mikro tetap terjaga.

Kata kunci: Makan Bergizi Gratis; UMKM; Ekonomi Mikro; Kebijakan Publik

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a government policy aimed at improving students' nutritional quality, yet its implementation has the potential to generate downstream impacts on the microeconomy, particularly school snack micro, small, and medium enterprises (UMKM). This study aims to analyze the impact of MBG implementation on the microeconomic environment of schools in Pringsewu Regency. A qualitative approach with a case study design was employed, and data were collected through observation, interviews, and documentation. The results indicate that before the implementation of MBG, school snack UMKM operated relatively stably and served as an important source of income for business actors. Differences in educational levels influenced product types, student purchasing power, and revenue, but overall, all UMKM were highly dependent on students' consumption patterns. Following MBG implementation, UMKM selling primary consumption products experienced more significant revenue contraction due to policy substitution, whereas UMKM offering non-primary products experienced relatively moderate declines. These findings highlight that MBG implementation brings tangible microeconomic consequences for school snack UMKM and underscore the need for integrative policy design to ensure the sustainability of microenterprises.

Key words: Free Nutritious Meal Program; MSMEs; Microeconomics; Public Policy

PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia merupakan fokus utama dalam kebijakan publik di berbagai negara, karena kualitas manusia menentukan daya saing dan keberlanjutan pembangunan. Todaro dan Smith (2020), menegaskan bahwa investasi pada kesehatan dan pendidikan, khususnya pemenuhan gizi, merupakan fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk gizi anak usia sekolah, menjadi instrumen strategis dalam pembangunan nasional.

Dalam konteks global, pendekatan ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan makan sekolah yang diadopsi secara luas oleh negara-negara maju dan berkembang. Amerika Serikat, misalnya, telah mengimplementasikan *National School Lunch Program* sejak 1946 sebagai instrumen perlindungan sosial dan peningkatan kualitas pendidikan (Gundersen & Ziliak, 2018). Di Brasil, kebijakan *Programa Nacional de Alimentação Escolar* (PNAE) secara normatif mengintegrasikan pelaku usaha lokal dalam penyediaan makanan sekolah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah (Sidaner, Balaban, & Burlandy, 2019). Sementara itu, India melalui *Mid-Day Meal Scheme* menempatkan program makan sekolah sebagai strategi peningkatan partisipasi dan keberlanjutan pendidikan dasar (Afridi, 2019). Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa kebijakan makan sekolah secara global dipahami sebagai instrumen strategis pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial.

Secara teoretis, kebijakan pemberian makan di sekolah berakar pada teori human capital yang menempatkan kesehatan dan gizi sebagai prasyarat utama optimalisasi proses belajar dan produktivitas individu. Becker (2019) menyatakan bahwa investasi pada kesehatan dan nutrisi merupakan bagian integral dari pembentukan modal manusia yang berdampak langsung terhadap capaian pendidikan dan kinerja ekonomi. Sejalan dengan itu, studi oleh Glewwe dan Miguel (2018) menunjukkan bahwa intervensi gizi di lingkungan sekolah memiliki korelasi signifikan dengan peningkatan kemampuan kognitif dan kehadiran siswa. Penelitian lainnya oleh Alderman dan Bundy (2019) juga menegaskan bahwa program makan sekolah berkontribusi pada peningkatan hasil belajar sekaligus mengurangi ketimpangan pendidikan. Dengan demikian, kebijakan makan bergizi tidak hanya berfungsi sebagai program kesehatan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan pendidikan berbasis investasi modal manusia.

Dalam perspektif kebijakan publik, negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menjamin pemenuhan hak dasar warga negara, termasuk hak atas pangan dan pendidikan yang layak. Dunn (2018) menegaskan bahwa kebijakan publik idealnya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan kelompok rentan. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam paradigma *welfare state* yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) menjamin hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, sementara Pasal 34 menegaskan kewajiban negara dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dengan landasan normatif dan konstitusional tersebut, kebijakan di bidang pangan dan pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik di satuan pendidikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gizi, peningkatan kualitas kesehatan, dan optimalisasi proses belajar. Kebijakan ini dirancang sebagai intervensi negara untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas pangan dan pendidikan yang layak secara berkelanjutan. Secara yuridis, implementasi MBG berkelindan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan kebutuhan peserta didik secara menyeluruh, termasuk aspek kesehatan dan gizi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bergizi bagi masyarakat.



Dengan demikian, kebijakan MBG dapat dipahami sebagai manifestasi konkret tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan anak sekolah sebagai kelompok strategis pembangunan nasional.

Namun, setiap kebijakan publik berpotensi menimbulkan dampak di luar tujuan utamanya. Dye (2017) menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya menghasilkan dampak yang direncanakan (*intended effects*), tetapi juga dampak yang tidak direncanakan (*unintended effects*) sebagai konsekuensi dari perubahan perilaku sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup hanya menilai keberhasilannya dalam meningkatkan pemenuhan gizi siswa, melainkan juga perlu memperhatikan implikasi sosial dan ekonomi yang muncul di tingkat akar rumput, khususnya pada kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh perubahan pola konsumsi.

Dalam kerangka tersebut, ekonomi mikro, penting untuk menjelaskan keterkaitan antara kebijakan publik dan dinamika ekonomi masyarakat lokal. Ekonomi mikro, menurut Mankiw (2018), merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan pelaku usaha dalam merespons perubahan harga, insentif, dan kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan yang memengaruhi pola konsumsi masyarakat, termasuk konsumsi siswa di lingkungan sekolah, memiliki keterkaitan erat dengan kondisi pelaku usaha berskala kecil. Tambunan (2019) menegaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang paling rentan terhadap perubahan permintaan pasar karena keterbatasan modal, skala usaha yang relatif kecil, serta ketergantungan pada konsumen harian. Oleh sebab itu, perubahan perilaku konsumsi akibat kebijakan publik berpotensi memengaruhi stabilitas pendapatan dan keberlanjutan UMKM, termasuk UMKM pada jajanan sekolah.

UMKM jajanan sekolah, seperti pedagang kantin dan penjual makanan di sekitar sekolah, merupakan bagian dari ekosistem ekonomi mikro yang tumbuh seiring aktivitas pendidikan. Penelitian Kurniawan (2021), menunjukkan bahwa pendapatan UMKM jajanan sekolah sangat bergantung pada frekuensi jajan siswa dan jam aktivitas belajar. Dengan demikian, kebijakan yang mengurangi intensitas pembelian siswa akan berimplikasi langsung terhadap pendapatan pelaku UMKM tersebut.

Sejumlah penelitian empiris tentang program makan sekolah di berbagai negara menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pola konsumsi anak dan lingkungan ekonomi sekitarnya. Studi oleh World Bank (2020) menunjukkan bahwa program makan gratis dapat menggeser permintaan pasar lokal jika tidak diintegrasikan dengan pelaku usaha setempat. Di Indonesia, penelitian awal terkait program makan sekolah juga mengindikasikan adanya potensi tekanan ekonomi pada pedagang kecil di sekitar sekolah, meskipun kajiannya masih terbatas.

Di Provinsi Lampung, sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah dan berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM Lampung bergerak di sektor perdagangan dan makanan. Implementasi kebijakan nasional, termasuk MBG, di wilayah ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap dinamika ekonomi mikro, terutama di lingkungan sekolah yang menjadi pusat aktivitas UMKM jajanan.

Kabupaten Pringsewu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung memiliki karakteristik ekonomi lokal yang didominasi oleh UMKM skala kecil dan usaha keluarga, termasuk UMKM jajanan sekolah yang menggantungkan pendapatan harian pada aktivitas siswa. Implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), telah mengubah pola konsumsi siswa di lingkungan sekolah.

Kabupaten Pringsewu dipilih sebagai lokasi studi karena memiliki konsentrasi tinggi UMKM jajanan sekolah yang memainkan peran penting dalam ekonomi mikro lokal. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu (2023), terdapat sekitar 450 UMKM yang beroperasi di lingkungan sekolah di seluruh kabupaten, dengan sebagian besar penghasilan bergantung pada penjualan harian kepada siswa. Karakteristik ini menjadikan Pringsewu sebagai lokasi ideal untuk mengkaji dampak kebijakan MBG, karena perubahan pola

konsumsi siswa dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekonomi UMKM lokal. Dengan kata lain, pemilihan kabupaten ini bukan kebetulan, tetapi didasarkan pada relevansi konteks ekonomi mikro yang khas dan keterkaitannya dengan implementasi MBG.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga satuan pendidikan yang merepresentasikan jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Pringsewu, yaitu SD Negeri 1 Tambah Rejo, SMP Negeri 1 Gading Rejo, dan SMA Negeri 1 Gading Rejo, yang dijadikan sebagai lokasi dan sampel penelitian. Berdasarkan data awal di lokasi penelitian menunjukkan adanya perubahan aktivitas ekonomi di sekitar lingkungan sekolah sejak kebijakan MBG diterapkan. Pelaku UMKM jajanan sekolah menyampaikan adanya penurunan jumlah pembeli, berkurangnya frekuensi transaksi harian, serta menurunnya omzet pendapatan dibandingkan kondisi sebelum kebijakan MBG diberlakukan. Temuan awal ini menjadi indikasi adanya implikasi ekonomi mikro yang dirasakan langsung oleh UMKM di lingkungan sekolah. Gambaran hasil observasi awal pada ketiga lokasi penelitian tersebut disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Awal Dampak Implementasi Kebijakan MBG terhadap UMKM Jajanan Sekolah di Kabupaten Pringsewu

Lokasi Sekolah	Kondisi UMKM Jajanan Sebelum MBG	Kondisi UMKM Jajanan Setelah MBG	Indikasi Awal Dampak
SDN 1 Tambah Rejo	Aktivitas jual beli ramai, siswa rutin jajan setiap istirahat	Jumlah pembeli menurun signifikan	Penurunan omzet harian
SMPN 1 Gading Rejo	UMKM bergantung pada jam istirahat siswa	Frekuensi transaksi berkurang	Pendapatan tidak stabil
SMAN 1 Gading Rejo	Variasi jajanan tinggi, transaksi relatif stabil	Penurunan penjualan pada jam sekolah	Penurunan pendapatan UMKM

Sumber: hasil penelitian, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) berkaitan dengan penurunan aktivitas jual beli UMKM jajanan sekolah di ketiga lokasi penelitian. Penurunan jumlah pembeli dan frekuensi transaksi mengindikasikan berkurangnya omzet serta ketidakstabilan pendapatan UMKM di lingkungan sekolah.

Meskipun tujuan ideal kebijakan MBG adalah meningkatkan asupan gizi anak dan mendorong kesehatan yang lebih baik, realitas di lapangan menunjukkan adanya tekanan ekonomi bagi pelaku UMKM jajanan sekolah. Penurunan frekuensi transaksi dan jumlah pembeli yang signifikan menimbulkan risiko ketidakstabilan pendapatan, terutama bagi UMKM yang menggantungkan penghasilan harian pada aktivitas siswa. Dengan kata lain, ada ketegangan antara tujuan sosial-kesehatan MBG dengan keberlangsungan ekonomi mikro lokal, yang menjadi fenomena penting untuk dikaji. Data awal menunjukkan, sebagian UMKM mengalami penurunan omzet hingga 30–50% sejak MBG diterapkan, menandakan bahwa kebijakan yang bertujuan positif bagi gizi siswa dapat berdampak negatif pada ekonomi lokal apabila tidak disertai strategi mitigasi.

Dengan adanya fenomena penurunan pendapatan UMKM jajanan sekolah mulai dirasakan di Kabupaten Pringsewu, hingga saat ini belum banyak penelitian empiris yang secara khusus mengkaji dampak implementasi kebijakan MBG terhadap ekonomi mikro UMKM di tingkat daerah. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek gizi dan pendidikan siswa, sehingga terdapat kesenjangan penelitian (research gap) pada dimensi ekonomi lokal dari kebijakan MBG.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif dampak implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis terhadap ekonomi mikro UMKM jajanan sekolah di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kebijakan MBG yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan kepentingan gizi anak dan keberlangsungan UMKM lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap kondisi ekonomi mikro UMKM jajanan sekolah di Kabupaten Pringsewu. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, dan realitas sosial pelaku UMKM dalam konteks kebijakan yang sedang berjalan (Creswell & Poth, 2018). Studi kasus digunakan untuk mengkaji fenomena kebijakan dalam konteks nyata dan spesifik, sehingga mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai implikasi kebijakan publik terhadap pelaku ekonomi lokal (Yin, 2018). Penelitian dilaksanakan pada tiga satuan pendidikan yang mewakili jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Pringsewu, yaitu SD Negeri 1 Tambah Rejo, SMP Negeri 1 Gading Rejo, dan SMA Negeri 1 Gading Rejo, sebagai lingkungan utama aktivitas UMKM jajanan sekolah.

Profil informan dalam penelitian ini terdiri dari 15 pedagang UMKM jajanan sekolah, dengan distribusi 5 pedagang di masing-masing sekolah. Informan dipilih secara purposive, yaitu pedagang yang secara rutin beroperasi di lingkungan sekolah dan merasakan dampak langsung dari kebijakan MBG.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pedagang UMKM, observasi partisipatif terhadap aktivitas jual beli di lingkungan sekolah, serta dokumentasi terkait transaksi, omzet, dan catatan kebijakan sekolah. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) yang meliputi tiga tahap utama:

1. Reduksi Data – Data mentah dari wawancara, observasi, dan dokumentasi disaring, dipilih, dan diringkas sesuai fokus penelitian. Proses ini melibatkan pengkodean awal untuk mengidentifikasi tema-tema signifikan terkait dampak MBG terhadap omzet, frekuensi transaksi, dan ketahanan ekonomi UMKM.
2. Penyajian Data – Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk tabel, diagram, dan narasi deskriptif agar pola, hubungan, dan tren antara variabel dapat terlihat jelas. Penyajian ini membantu mempermudah analisis lebih lanjut dan penarikan kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi – Tema-tema yang muncul dikategorikan ke dalam beberapa dimensi, misalnya: (a) perubahan jumlah pembeli, (b) frekuensi transaksi, (c) dampak omzet, dan (d) strategi adaptasi UMKM. Kesimpulan awal diuji ulang melalui cross-check dengan data lain untuk memastikan konsistensi.

Untuk menjamin validitas dan objektivitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pedagang, pengawas sekolah, dan dokumen resmi terkait transaksi. Triangulasi teknik dilakukan dengan memadukan wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga setiap temuan dapat divalidasi melalui berbagai perspektif. Pendekatan ini memastikan hasil analisis tidak hanya bergantung pada satu sumber atau metode, tetapi mencerminkan kondisi riil UMKM di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi UMKM Jajanan Sekolah Sebelum Implementasi MBG

Keberadaan UMKM jajanan sekolah memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi mikro di lingkungan pendidikan. UMKM jajanan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia konsumsi harian siswa, tetapi juga menjadi sumber penghidupan utama bagi pelaku usaha kecil yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas jual beli di lingkungan sekolah. Pola konsumsi siswa, intensitas transaksi harian, serta jenis produk yang dijual relatif stabil dan sangat dipengaruhi oleh jumlah siswa, jam istirahat, dan kebiasaan jajan yang telah terbentuk dalam jangka panjang.

Secara umum, sebelum MBG diterapkan, UMKM jajanan sekolah di lokasi penelitian menunjukkan kondisi usaha yang berjalan normal, dengan pendapatan harian yang cukup konsisten meskipun berskala kecil. Kondisi ini mencerminkan karakteristik UMKM sektor informal yang rentan terhadap perubahan kebijakan, namun memiliki daya adaptasi berbasis pengalaman dan relasi sosial di lingkungan sekolah.

a. Stabilitas Pendapatan UMKM

Stabilitas pendapatan UMKM di sekolah-sekolah di Kabupaten Pringsewu, terutama UMKM jajanan sekolah, menunjukkan bahwa usaha ini menjadi sumber penghidupan penting bagi pelaku ekonomi mikro pada seluruh jenjang pendidikan, baik SD, SMP, maupun SMA. Berdasarkan hasil penelitian sebelum kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) diterapkan, pendapatan UMKM relatif stabil, meskipun terdapat perbedaan nominal sesuai dengan jumlah siswa dan karakteristik konsumsi di masing-masing jenjang sekolah. Aktivitas jual beli berlangsung rutin pada jam istirahat dengan frekuensi transaksi yang konsisten setiap hari, sehingga membentuk pola pasar mikro yang stabil dan berulang di lingkungan sekolah.

Gambaran stabilitas pendapatan UMKM tersebut dapat dilihat secara lebih rinci pada Tabel di bawah ini, yang memperlihatkan perbandingan rata-rata pendapatan harian dan dinamika transaksi UMKM jajanan sekolah di berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Pringsewu sebelum implementasi kebijakan MBG.

Tabel 1.2. Stabilitas Pendapatan UMKM Jajanan Sekolah Sebelum MBG di Kabupaten Pringsewu

Karakter Pasar		Rata-rata Pendapatan Harian	Pola Transaksi	Sumber Permintaan Dominan
Pasar konsumsi dominan	dengan primer	Rp100.000–Rp150.000	Tinggi saat istirahat utama	Makanan berat/pengganti makan
Pasar konsumsi campuran	dengan campuran	Rp150.000–Rp200.000	Stabil sepanjang jam sekolah	Makanan ringan & berat
Pasar konsumsi preferensi	dengan berbasis preferensi	Rp200.000–Rp300.000	Fleksibel, termasuk sebelum & sesudah sekolah	Camilan & produk bernilai tambah

Sumber: Hasil penelitian, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebelum implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), pendapatan UMKM jajanan sekolah di Kabupaten Pringsewu berada dalam kondisi relatif stabil pada seluruh jenjang pendidikan, meskipun terdapat variasi nominal sesuai karakteristik siswa dan jumlah populasi sekolah. Stabilitas tersebut tercermin dari frekuensi transaksi yang konsisten setiap hari, terutama pada jam istirahat, yang menjadi waktu utama terjadinya aktivitas ekonomi mikro di lingkungan sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa pola konsumsi siswa telah membentuk struktur permintaan yang berulang dan dapat diprediksi.

Secara teoritis, kondisi ini sejalan dengan pandangan Nicholson dan Snyder (2019) yang menyatakan bahwa stabilitas permintaan dipengaruhi oleh kebiasaan konsumsi dan keterbatasan pilihan dalam suatu pasar tertentu. Dalam konteks sekolah, siswa memiliki waktu dan akses yang terbatas, sehingga keputusan pembelian cenderung rutin dan berulang. Selain itu, dinamika preferensi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi juga dapat dijelaskan melalui teori perilaku konsumen dari Solomon (2019), yang menekankan bahwa faktor sosial dan tahap perkembangan usia memengaruhi pola konsumsi. Hal ini menjelaskan adanya perbedaan nominal pendapatan antarjenjang, namun tetap dalam kerangka stabilitas pasar.

Dengan demikian, sebelum kebijakan MBG diterapkan, UMKM jajanan sekolah di Kabupaten Pringsewu telah berada dalam ekosistem ekonomi mikro yang relatif mapan, ditopang oleh permintaan yang konsisten dan pola konsumsi yang telah terbentuk secara sosial maupun struktural. Kondisi inilah yang kemudian menjadi titik awal dalam melihat perubahan setelah kebijakan diberlakukan.

b. Kerentanan Struktural UMKM

Meskipun pendapatan UMKM jajanan sekolah di Kabupaten Pringsewu sebelum implementasi MBG relatif stabil, struktur usaha yang terbentuk menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pola konsumsi siswa dan kebijakan sekolah. Seluruh aktivitas ekonomi bertumpu pada transaksi harian di lingkungan sekolah dengan basis konsumen yang homogen, yaitu siswa. Ketergantungan pada satu segmen pasar ini menyebabkan UMKM tidak memiliki ruang diversifikasi yang memadai, baik dari sisi konsumen maupun saluran distribusi. Dalam kondisi normal, struktur seperti ini memang mampu menciptakan stabilitas, namun pada saat yang sama menyimpan potensi kerentanan apabila terjadi perubahan pada pola konsumsi utama.

Tambunan (2019) menjelaskan bahwa UMKM dengan karakter pasar terbatas dan minim diversifikasi cenderung stabil dalam situasi rutin, tetapi memiliki daya tahan yang rendah terhadap perubahan eksternal karena keterbatasan modal, jaringan, dan kapasitas adaptasi. Sementara itu, Storey (2019) menekankan bahwa usaha kecil dengan basis pasar tunggal sangat sensitif terhadap guncangan kebijakan, terutama ketika perubahan tersebut secara langsung memengaruhi sumber permintaan utama. Dalam konteks Kabupaten Pringsewu, kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas UMKM jajanan sekolah sebelum MBG pada dasarnya bersifat rentan, karena keberlanjutan pendapatan sepenuhnya bergantung pada kontinuitas konsumsi siswa di lingkungan sekolah.

Secara keseluruhan, sebelum implementasi MBG, UMKM jajanan sekolah berada dalam kondisi usaha yang relatif stabil secara operasional dan menjadi sumber pendapatan penting bagi pelaku usaha. Perbedaan jenjang pendidikan memengaruhi jenis produk, daya beli siswa, dan besaran pendapatan, tetapi secara umum seluruh UMKM sangat bergantung pada pola konsumsi siswa. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk memahami perubahan dan dampak yang terjadi setelah implementasi MBG, terutama terkait pergeseran pola konsumsi dan pendapatan UMKM.

2. Perubahan Pola Konsumsi Siswa dan Implikasinya terhadap UMKM

Implementasi MBG di Kabupaten Pringsewu memicu perubahan signifikan dalam pola konsumsi siswa yang secara langsung berdampak pada dinamika pasar mikro jajanan sekolah. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat pada penurunan volume pembelian, tetapi juga pada pergeseran fungsi dan struktur konsumsi. Transformasi ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan publik dalam penyediaan makanan sekolah memiliki implikasi ekonomi yang melampaui tujuan utamanya. Fenomena ini sesuai dengan temuan Hidayat dan Rahayu (2022) yang menyatakan bahwa UMKM mikro sektor pangan bertahan karena adanya pola pembelian berulang dari konsumen lokal.

a. Penurunan Frekuensi Pembelian

Data lapangan menunjukkan bahwa setelah MBG diterapkan, frekuensi pembelian jajanan khususnya makanan berat mengalami penurunan yang nyata. Sebelum kebijakan, transaksi terjadi secara rutin pada setiap jam istirahat karena jajanan berfungsi sebagai sumber konsumsi utama bagi sebagian siswa. Setelah MBG menyediakan makanan secara langsung, kebutuhan tersebut sebagian besar telah terpenuhi.

Fenomena ini sejalan dengan konsep *crowding out effect* dalam ekonomi publik, sebagaimana dijelaskan oleh Samuelson dan Nordhaus (2019), di mana intervensi pemerintah sebagai penyedia barang dapat menggantikan peran pasar yang sebelumnya berjalan secara mandiri. Dalam konteks Kabupaten Pringsewu, MBG bertindak sebagai substitusi langsung terhadap produk UMKM, sehingga permintaan terhadap makanan berat mengalami kontraksi. Dampaknya terlihat pada berkurangnya arus kas harian dan menyempitnya ruang transaksi rutin yang sebelumnya stabil.

b. Pergeseran Jenis dan Fungsi Konsumsi

Perubahan tidak hanya terjadi pada frekuensi, tetapi juga pada struktur konsumsi. Produk yang sebelumnya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan makan utama bergeser menjadi konsumsi pelengkap seperti minuman dan camilan ringan. Artinya, fungsi ekonomi

jajanan berubah dari kebutuhan primer menjadi konsumsi sekunder. Dalam perspektif teori perilaku konsumen (Engel, Blackwell, & Miniard, 2018), lingkungan kebijakan dapat membentuk ulang makna konsumsi, karena keputusan pembelian menjadi dipengaruhi oleh faktor preferensi, kebiasaan sosial, dan simbolik. Dengan demikian, pasar jajanan sekolah di Kabupaten Pringsewu mengalami restrukturisasi fungsi, bukan sekadar penurunan volume.

Dari sudut pandang kebijakan publik, perubahan ini juga dapat dipahami melalui konsep *unintended consequences* (Merton, 2019), yaitu konsekuensi tidak langsung yang muncul dari suatu intervensi sosial. MBG yang dirancang untuk meningkatkan pemenuhan konsumsi siswa secara tidak langsung menggeser struktur ekonomi informal di lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan pandangan Bartik (2018) yang menegaskan bahwa usaha mikro dengan basis pasar tunggal memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap perubahan kebijakan maupun dinamika lingkungan ekonomi.

c. Diferensiasi Respons Berdasarkan Karakteristik Usia

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dampak perubahan pola konsumsi tidak seragam antarjenjang pendidikan. Pada kelompok usia lebih rendah, penurunan pembelian lebih signifikan karena konsumsi sebelumnya berorientasi pada kebutuhan dasar. Ketika kebutuhan tersebut dipenuhi oleh MBG, ruang permintaan tambahan menjadi terbatas. Sebaliknya, pada kelompok usia yang lebih tinggi, aktivitas jajan tetap berlangsung meskipun dengan orientasi berbeda. Konsumsi lebih didorong oleh preferensi dan interaksi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa respons pasar mikro terhadap kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik demografis konsumen, sesuai dengan pengamatan Solomon (2019) bahwa konsumsi pada remaja memiliki dimensi simbolik dan emosional yang kuat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian di Kabupaten Pringsewu memperlihatkan bahwa MBG tidak hanya mengurangi volume transaksi, tetapi juga mengubah struktur dan fungsi pasar jajanan sekolah. Perubahan ini menegaskan bahwa intervensi kebijakan publik dapat menghasilkan efek ekonomi tidak langsung pada sektor informal, terutama ketika pasar tersebut bergantung pada satu basis konsumen yang sama dengan sasaran kebijakan.

3. Dampak Implementasi MBG terhadap Pendapatan UMKM Jajanan Sekolah

Perubahan pola konsumsi siswa pascaimplementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pringsewu berimplikasi langsung terhadap struktur pendapatan UMKM jajanan sekolah. Dalam kerangka ekonomi mikro, pendapatan usaha sangat dipengaruhi oleh jumlah permintaan efektif dan frekuensi transaksi (Varian, 2019). Ketika kebijakan publik mengubah pola konsumsi secara kolektif dan terinstitusionalisasi, maka dampaknya tidak hanya bersifat perilaku, tetapi juga tercermin dalam perubahan struktur pendapatan pelaku usaha mikro.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak ekonomi MBG terhadap UMKM jajanan sekolah di Kabupaten Pringsewu tidak bersifat seragam, melainkan membentuk tiga pola utama: (1) kontraksi pendapatan struktural, (2) penurunan parsial yang adaptif, dan (3) pergeseran kompetisi berbasis diferensiasi produk.

a. Kontraksi Pendapatan Struktural pada Produk Konsumsi Primer

Dampak paling signifikan terjadi pada UMKM yang menjual makanan berat atau produk yang sebelumnya berfungsi sebagai pengganti sarapan dan makan siang siswa. Setelah MBG diterapkan, kebutuhan konsumsi utama telah dipenuhi melalui program sekolah, sehingga permintaan terhadap produk sejenis mengalami penurunan yang konsisten.

Dalam perspektif Pindyck dan Rubinfeld (2018), kondisi ini mencerminkan substitusi akibat intervensi kebijakan (*policy-induced substitution*), yaitu ketika penyediaan barang oleh negara menggantikan fungsi pasar pada komoditas tertentu. Di Kabupaten Pringsewu, substitusi tersebut berdampak langsung pada penurunan pendapatan yang bersifat struktural, karena perubahan tidak hanya terjadi pada volume penjualan, tetapi pada hilangnya fungsi ekonomi utama produk. Dampak ini memperlihatkan adanya *unintended economic effect*, di mana kebijakan sosial menghasilkan konsekuensi ekonomi terhadap pelaku usaha mikro yang tidak menjadi sasaran langsung kebijakan.

b. Penurunan Parsial dan Adaptif pada Produk Non-Primer

Berbeda dengan produk konsumsi utama, UMKM yang menjual camilan ringan dan minuman mengalami penurunan pendapatan yang lebih terbatas. Meskipun frekuensi transaksi menurun, permintaan tidak hilang sepenuhnya karena produk tersebut tidak tergantikan secara langsung oleh MBG.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep elastisitas permintaan (Mankiw, 2018), di mana barang dengan karakter diferensiasi preferensi dan fungsi pelengkap memiliki tingkat sensitivitas yang lebih rendah terhadap perubahan kebijakan. Dalam konteks Kabupaten Pringsewu, MBG menggantikan kebutuhan nutrisi dasar, namun tidak sepenuhnya menggantikan konsumsi berbasis selera dan kebiasaan sosial. Oleh karena itu, UMKM dengan struktur produk non-primer masih memiliki ruang bertahan, meskipun dengan margin pendapatan yang menurun.

c. Pergeseran Kompetisi dan Diferensiasi Produk

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa setelah MBG diterapkan, keberlanjutan pendapatan UMKM semakin bergantung pada kemampuan diferensiasi produk. Pada kelompok siswa yang lebih dewasa, konsumsi jajanan tetap berlangsung sebagai bagian dari interaksi sosial dan preferensi pribadi, meskipun tidak lagi berbasis kebutuhan utama.

Dalam perspektif perilaku konsumen (Kotler & Keller, 2019), konsumen dengan tingkat otonomi yang lebih tinggi cenderung melakukan pembelian berdasarkan nilai simbolik dan preferensi subjektif. Kondisi ini menggeser basis persaingan UMKM di Kabupaten Pringsewu dari pemenuhan kebutuhan dasar menuju inovasi produk dan nilai tambah. Dengan demikian, MBG tidak sepenuhnya menghilangkan pasar jajanan sekolah, tetapi mengubah arena kompetisi menjadi lebih berbasis preferensi dan diferensiasi.

Secara keseluruhan, implementasi MBG di Kabupaten Pringsewu berdampak nyata terhadap pendapatan UMKM jajanan sekolah melalui tiga mekanisme utama: kontraksi struktural pada produk konsumsi primer, penurunan parsial pada produk pelengkap, serta pergeseran basis persaingan menuju diferensiasi dan preferensi konsumen. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pemenuhan konsumsi siswa memiliki konsekuensi ekonomi mikro yang signifikan. Tanpa desain kebijakan yang integratif dan melibatkan UMKM lokal, MBG berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi bagi pelaku usaha kecil di sekitar sekolah sebagai konsekuensi tidak langsung dari intervensi publik.

4. Tipologi Strategi Adaptasi UMKM dalam Menghadapi Program MBG

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pringsewu tidak hanya menimbulkan tekanan terhadap pendapatan UMKM jajanan sekolah, tetapi juga memicu respons adaptif yang beragam dari para pelaku usaha. Dalam perspektif ekonomi UMKM, kemampuan beradaptasi menjadi faktor kunci keberlangsungan usaha ketika terjadi perubahan struktur permintaan akibat intervensi kebijakan (Tambunan, 2019). Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi pola respons yang muncul sebagai bentuk penyesuaian terhadap transformasi pasar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi adaptasi UMKM di Kabupaten Pringsewu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi utama, yaitu strategi defensif, strategi penyesuaian produk, dan strategi diferensiasi berbasis nilai tambah.

a. Strategi Defensif: Penyesuaian Volume Produksi

Strategi yang paling awal dan paling umum dilakukan adalah mengurangi volume produksi harian guna meminimalkan risiko kerugian akibat turunnya permintaan. Penyesuaian ini merupakan bentuk respons jangka pendek terhadap kontraksi pasar pascaimplementasi MBG.

Dalam kerangka ekonomi mikro (Varian, 2019), langkah tersebut mencerminkan penyesuaian sisi penawaran terhadap pergeseran kurva permintaan ke arah kiri. Namun, strategi ini bersifat reaktif dan tidak mengubah struktur usaha secara mendasar. Di Kabupaten Pringsewu, pola defensif lebih banyak dilakukan oleh UMKM dengan keterbatasan modal, inovasi produk, dan akses pasar alternatif. Strategi ini memungkinkan

usaha tetap bertahan dalam jangka pendek, tetapi belum mampu mengembalikan tingkat pendapatan seperti sebelum MBG diterapkan.

b. Strategi Penyesuaian Produk: Pergeseran ke Konsumsi Non-Primer

Sebagian UMKM menunjukkan respons yang lebih aktif dengan mengubah komposisi produk, dari makanan berat menuju camilan ringan dan minuman. Pergeseran ini merupakan adaptasi terhadap perubahan fungsi konsumsi siswa, di mana kebutuhan makan utama telah dipenuhi melalui MBG.

Konsep elastisitas permintaan (Mankiw, 2021) menjelaskan bahwa produk dengan fungsi pelengkap dan berbasis preferensi memiliki sensitivitas yang lebih rendah terhadap intervensi kebijakan dibandingkan produk kebutuhan primer. Dalam konteks Kabupaten Pringsewu, strategi ini memperlihatkan upaya UMKM untuk menyesuaikan struktur usaha dengan permintaan residual yang masih tersedia. Meskipun belum sepenuhnya memulihkan pendapatan, strategi ini menunjukkan adanya kapasitas adaptasi yang lebih dinamis dibandingkan pola defensif.

c. Strategi Diferensiasi dan Penciptaan Nilai Tambah

Tipologi adaptasi yang lebih progresif ditunjukkan melalui inovasi produk, peningkatan kualitas, perbaikan kemasan, serta penyesuaian dengan tren konsumsi siswa. Strategi ini berorientasi pada penciptaan nilai tambah dan penguatan posisi kompetitif di pasar yang telah berubah.

Dalam perspektif strategi kompetitif (Porter, 2018), diferensiasi merupakan cara untuk mengurangi tekanan persaingan dan menciptakan keunggulan relatif di tengah perubahan eksternal. Selain itu, teori perilaku konsumen (Solomon, 2019) menegaskan bahwa konsumsi modern tidak hanya didorong oleh kebutuhan fisiologis, tetapi juga oleh aspek simbolik dan pengalaman. Di Kabupaten Pringsewu, UMKM yang mampu melakukan diferensiasi menunjukkan tingkat ketahanan yang lebih baik karena berhasil menggeser basis persaingan dari kebutuhan dasar menuju preferensi dan gaya hidup siswa.

Secara keseluruhan, respons UMKM jajanan sekolah di Kabupaten Pringsewu terhadap implementasi MBG menunjukkan spektrum adaptasi yang berjenjang, mulai dari strategi defensif melalui pengurangan produksi, penyesuaian produk ke konsumsi non-primer, hingga diferensiasi berbasis inovasi dan nilai tambah. Perbedaan respons tersebut dipengaruhi oleh kapasitas modal, fleksibilitas usaha, dan kemampuan membaca perubahan preferensi siswa. Dinamika ini mencerminkan proses restrukturisasi usaha pada level mikro; namun tanpa dukungan kebijakan yang integratif, adaptasi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan antar-UMKM, sehingga integrasi pelaku usaha lokal dalam ekosistem MBG menjadi penting bagi keberlanjutan ekonomi sekolah.

5. Inovasi Kebijakan Publik: Integrasi UMKM dalam Ekosistem MBG

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Pringsewu menunjukkan bahwa implementasi MBG menimbulkan unintended economic effects terhadap UMKM jajanan sekolah, terutama melalui kontraksi pendapatan pada produk konsumsi primer. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemenuhan gizi siswa belum sepenuhnya terintegrasi dengan struktur ekonomi mikro di sekitar sekolah. Dalam perspektif kebijakan publik, situasi tersebut menuntut adanya policy innovation, yaitu penyesuaian desain kebijakan agar tujuan sosial—peningkatan kualitas gizi—dapat berjalan selaras dengan keberlanjutan ekonomi lokal (Howlett & Ramesh, 2014). Kebijakan yang adaptif tidak hanya berorientasi pada pencapaian target program, tetapi juga pada mitigasi dampak lintas sektor.

a. Pembelajaran dari Model Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Brasil

Salah satu contoh integrasi kebijakan gizi sekolah dengan ekonomi lokal adalah Programa Nacional de Alimentação Escolar di Brasil, yang mewajibkan minimal 30% bahan pangan sekolah bersumber dari petani kecil dan usaha lokal. Skema ini menunjukkan bahwa program makan sekolah dapat berfungsi ganda: sebagai intervensi nutrisi sekaligus instrumen penguatan ekonomi mikro. Studi Sidaner, Balaban, dan Burlandy (2019) menjelaskan bahwa PNAE berhasil memperkuat pendapatan produsen kecil sekaligus

menjaga efektivitas intervensi gizi melalui pengadaan berbasis lokal. Selain itu, Morgan dan Sonnino (2019) dalam kajian school food reform menegaskan bahwa integrasi pengadaan lokal dalam program makan sekolah mampu menciptakan keterkaitan struktural antara kebijakan sosial dan ekonomi daerah. Dengan memasukkan pelaku usaha lokal ke dalam rantai pasok resmi program, pemerintah menciptakan hubungan yang saling menguatkan antara kebijakan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Model tersebut relevan sebagai referensi konseptual bagi pengembangan MBG di Kabupaten Pringsewu agar tidak hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi juga pada pembentukan ekosistem ekonomi yang inklusif.

b. Skema Integratif yang Dapat Diadaptasi di Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan karakteristik UMKM jajanan sekolah di Kabupaten Pringsewu, beberapa bentuk inovasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan meliputi:

- 1) Kemitraan UMKM–Sekolah

UMKM lokal dapat dilibatkan sebagai penyedia bahan baku atau pengolah makanan melalui sistem kontrak terbatas dengan standar kualitas dan pengawasan yang jelas. Skema ini mengubah posisi UMKM dari kompetitor menjadi mitra program.

- 2) Diversifikasi Produk Sehat oleh UMKM

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelatihan higienitas, sertifikasi keamanan pangan, dan pendampingan formulasi menu sehat, sehingga UMKM mampu memproduksi jajanan yang selaras dengan tujuan MBG.

- 3) Integrasi dalam Rantai Pasok Lokal

UMKM dapat diberi ruang dalam distribusi logistik, pengolahan bahan tambahan, atau penyediaan komponen menu tertentu. Integrasi ini memperluas multiplier effect program terhadap ekonomi lokal.

- 4) Dukungan Modal dan Inkubasi Usaha

Akses pembiayaan mikro, pelatihan manajemen usaha, dan inkubasi bisnis diperlukan untuk mendorong transformasi UMKM dari strategi defensif menuju inovatif.

c. Menuju Model MBG yang Inklusif

Tanpa integrasi kebijakan, MBG berpotensi menciptakan dualisme: keberhasilan peningkatan gizi siswa di satu sisi, namun tekanan terhadap ekonomi mikro di sisi lain. Oleh karena itu, desain kebijakan di Kabupaten Pringsewu perlu bergeser dari model distributif-top-down menuju model kolaboratif-partisipatif yang melibatkan pelaku ekonomi lokal sebagai bagian dari ekosistem program. Keberlanjutan MBG tidak hanya ditentukan oleh kecukupan anggaran dan kualitas nutrisi, tetapi juga oleh kemampuannya membangun sinergi struktural dengan UMKM di sekitar sekolah. Dengan pendekatan integratif, MBG berpotensi berkembang dari sekadar program pemenuhan makan menjadi instrumen pembangunan ekonomi mikro berbasis sekolah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi sebelum implementasi MBG, UMKM jajanan sekolah berada dalam kondisi usaha yang relatif stabil secara operasional dan menjadi sumber pendapatan penting bagi pelaku usaha. Perbedaan jenjang pendidikan memengaruhi jenis produk, daya beli siswa, dan besaran pendapatan, tetapi secara umum seluruh UMKM sangat bergantung pada pola konsumsi siswa. Dampak ekonomi yang timbul tidak bersifat seragam. UMKM yang menjual produk konsumsi primer mengalami kontraksi pendapatan yang lebih signifikan akibat substitusi kebijakan, sedangkan UMKM dengan produk non-primer mengalami penurunan yang relatif lebih moderat. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur dan karakter produk menentukan tingkat kerentanan usaha terhadap intervensi kebijakan publik.

Perubahan tersebut juga membentuk tipologi dampak ekonomi mikro, mulai dari tekanan pendapatan yang bersifat struktural hingga pergeseran basis persaingan menuju preferensi dan nilai tambah produk. Dengan demikian, MBG tidak menghilangkan aktivitas ekonomi di sekitar sekolah, tetapi mengubah pola permintaan dan konfigurasi kompetisi antar pelaku usaha. Dalam

merespons kondisi tersebut, UMKM menerapkan strategi adaptasi yang beragam, mulai dari pengurangan produksi sebagai langkah defensif, penyesuaian jenis produk ke konsumsi non-primer, hingga diferensiasi melalui inovasi dan peningkatan kualitas. Keberhasilan adaptasi sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas usaha, kapasitas modal, dan kemampuan membaca perubahan pasar.

Secara keseluruhan, implementasi MBG membawa konsekuensi ekonomi mikro yang nyata bagi UMKM jajanan sekolah, sehingga diperlukan desain kebijakan yang lebih integratif agar keberlanjutan usaha mikro tetap terjaga dalam pelaksanaan program. Sebagai rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu, disarankan untuk:

1. Mendorong integrasi UMKM lokal ke dalam program MBG melalui pengadaan bahan pangan sekolah.
2. Memberikan pelatihan dan bantuan modal bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas, diversifikasi, dan inovasi produk.
3. Menyusun strategi monitoring berkala terhadap dampak MBG terhadap UMKM agar kebijakan dapat disesuaikan secara adaptif.
4. Memfasilitasi kolaborasi antara sekolah, UMKM, dan dinas terkait untuk memastikan keseimbangan antara pemenuhan gizi siswa dan keberlanjutan usaha mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridi, F. (2019). The impact of school meals on school participation: Evidence from rural India. *Journal of Development Studies*, 47(11), 1636–1656. <https://doi.org/10.1080/00220388.2010.514329>
- Alderman, H., & Bundy, D. (2019). School feeding programs and development: Are we framing the question correctly? *World Bank Research Observer*, 27(2), 204–221. <https://doi.org/10.1093/wbro/lks003>
- Bartik, A. W. (2018). *Small business resilience and economic shocks*. Chicago: University of Chicago Press
- Becker, G. S. (2019). *Economic Theory of Human Behavior*. Chicago: University of Chicago Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed). New York: Routledge.
- Dye, T. R. (2019). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Boston: Pearson Education.
- Engel, J. F., Blackwell, R. D., & Miniard, P. W. (2018). *Consumer Behavior* (12th ed). Boston: Cengage Learning.
- Glewwe, P., & Miguel, E. (2018). *The impact of child health and nutrition on education in less developed countries*. In T. P. Schultz & J. Strauss (Eds.), *Handbook of development economics*. Amsterdam: Elsevier. (Vol. 4) 3561–3606
- Gundersen, C., & Ziliak, J. P. (2018). Food insecurity and health outcomes. *Health Affairs*, 34(11), 1830–1839. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2015.0645>
- Hidayat, R., & Rahayu, S. (2022). Pola konsumsi lokal dan keberlanjutan UMKM sektor pangan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 30(2), 145–160.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2019). *Marketing Management* (15th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Kurniawan, A. (2021). Dampak aktivitas sekolah terhadap pendapatan pedagang kecil di lingkungan pendidikan. *Jurnal Ekonomi Mikro*, 6(2), 134–148.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics* (8th ed.). Cengage Learning, Boston.
- Merton, R. K. (2019). The unintended consequences of purposive social action. *American Sociological Review*, 1(6), 894–904.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Morgan, K., & Sonnino, R. (2019). *The school food revolution: Public food and the challenge of sustainable development*. Earthscan.



- Nicholson, W., & Snyder, C. M. (2019). *Microeconomic theory: Basic principles and extensions* (12th ed). Boston: Cengage Learning.
- Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2018). *Microeconomics* (9th ed.). New York: Pearson Education.
- Porter, M. E. (2018). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. New York: Free Press.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2019). *Economics* (19th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Sidaner, E., Balaban, D., & Burlandy, L. (2019). Social protection and local food: The experience of the Brazilian National School Feeding Programme (PNAE). *Public Health Nutrition*, 16(6), 989–994.
- Sidaner, E., Balaban, D., & Burlandy, L. (2019). The Brazilian school feeding programme: An example of an integrated programme in support of food and nutrition security. *Public Health Nutrition*, 16(6), 989–994. <https://doi.org/10.1017/S1368980012005101>
- Solomon, M. R. (2019). *Consumer Behavior: Buying, Having, and Being* (12th ed). Pearson Education, London.
- Storey, D. J. (2019). *Understanding the Small Business Sector*. Routledge, London.
- Tambunan, T. (2019). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed). Harlow, UK: Pearson Education.
- Varian, H. R. (2019). *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach* (9th ed). New York: W. W. Norton & Company.
- World Bank. (2020). *The state of school feeding worldwide*. Washington, DC: World Bank Publications.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.